

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan:

1. Pemberdayaan Petani Keramba Jaring Apung Di Desa Pematang Jering masih belum terimplementasi dengan optimal dalam penerapannya karena belum semua indikator pemberdayaan terlaksana dengan baik, khususnya pada indikator kemampuan ekonomi dan kemandirian karena Petani Keramba masih bergantung pada bantuan dari Pemerintah, baik berupa modal, benih, maupun pendampingan teknis. Selain itu, para Petani juga menghadapi kendala harga pakan yang tinggi dan pasar yang terbatas, sehingga belum mampu mengelola usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Kendala utama yang dihadapi Pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan Petani Keramba Jaring Apung di Desa Pematang Jering adalah Legalitas dalam izin usaha keramba yang masih diperjuangkan karena sulitnya akses untuk sampai kepada Pemerintah Kabupaten maupun Provinsi mengenai izin usaha keramba Desa Pematang Jering sehingga keramba tidak memiliki izin usaha berbadan hukum yang kuat.
3. Strategi dari Pemerintah Desa dalam menghadapi kendala utama adalah tetap terus mengajukan proposal dan izin legalitas usaha keramba kepada Pemerintah Kabupaten dan Provinsi agar setiap keramba memiliki izin usaha yang legal serta berbadan hukum sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

6.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan untuk semua pihak terkait, agar pemberdayaan petani keramba jaring apung di Desa Pematang Jering bisa berjalan lebih optimal.

1. Untuk Pemerintah Desa

Pemerintah desa perlu lebih aktif dan konsisten dalam mengawal proses legalitas keramba, karena izin usaha sangat penting bagi perlindungan hukum dan akses bantuan petani. Selain itu, pemerintah desa juga perlu mengalokasikan dana atau menjalin kerja sama dengan pihak luar (seperti CSR atau LSM) untuk menambah dukungan dalam bentuk pelatihan, sarana produksi, dan promosi hasil panen petani. Pemerintah desa juga bisa membentuk forum diskusi rutin antara petani dan pemerintah agar komunikasi dua arah terus terjalin.

2. Untuk Dinas Perikanan

Dinas Perikanan Kabupaten Muaro Jambi diharapkan bisa lebih sering turun langsung ke lapangan, tidak hanya saat program tertentu, tetapi juga dalam memantau perkembangan dan kendala yang dihadapi petani secara berkala. Selain itu, dibutuhkan bantuan nyata seperti subsidi harga pakan, program pelatihan teknis, dan dukungan untuk pembangunan pabrik pakan dan benih lokal di desa. Hal ini penting untuk mengurangi ketergantungan petani pada pasokan dari luar desa yang seringkali mahal dan tidak stabil.

3. Untuk Petani Keramba

Petani keramba juga diharapkan lebih terbuka terhadap inovasi dan aktif mengikuti kegiatan pelatihan atau penyuluhan yang disediakan. Selain itu, petani bisa mulai membentuk kelompok usaha bersama agar bisa saling bantu dalam hal modal, pemasaran, dan tukar informasi. Dengan adanya kelompok yang kuat, petani punya posisi tawar yang lebih baik dan bisa lebih mudah mendapat dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta.